

## BAB I P E N D A H U L U A N



### A. Latar Belakang Masalah

Memasuki awal pelaksanaan otonomi daerah yang diiringi dengan krisis moneter dimana kepada daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk berdiri di atas kekuatannya sendiri, maka pemerintah daerah dihadapkan pada beberapa kesulitan yang pada dasarnya ditujukan bagi berjalannya proses pembangunan dan pemerintahan.

Daerah-daerah yang selama ini memiliki kekayaan alam yang berlimpah-limpah maka perihal otonomi daerah tentulah tidak menjadi persoalan, tetapi keadaan tersebut akan berbalik bagi daerah – daerah yang minus sumber daya alam dan juga sumber daya manusianya.

Hal yang utama dari pelaksanaan otonomi daerah ini adalah perihal tersedianya sumber dana bagi terselenggaranya pelaksanaan pembangunan pada daerah yang bersangkutan, sehingga dengan demikian maka pelaksanaan administrasi keuangan bagi masing-masing daerah perlu dikelola dan ditata sebaik mungkin sehingga berimbang balik bagi mendukung peningkatan kesejahteraan bagi daerah yang bersangkutan.

Pelaksanaan administrasi keuangan sebagai salah satu kajian ilmu pemerintahan pada suatu daerah dimulai dari terbitnya anggaran pada daerah yang bersangkutan. Atau dengan perkataan lain bahwa suatu daerah di dalam kegiatan